

Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) (Studi Deskriptif tentang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan)

Tukiman
FISIP UPN "Veteran" Jatim

***Abstract:** This research utilize diskriptif kualitatif's method that analyzes a variable which is indigent society empowerment via programs effort group with a study diskriptif about productive economy effort at Menanggal-Gayungan's district. Economic effort help management productive (UEP) collegial and individual, pengguliran passes through to lent fund social solidarity fee (IKS), and UEP'S profit sharing in agglomerate effort with. Result of this research is that on duty Province Social and on duty city Social via UPKM has done masyarakat's empowerment hole in the wall via effort group with deep shaped productive economic effort, help is done / is given collegial / agglomerate but its seed money is brought off on an individual basis but regular in kelompok.dan's responsibility in that management available agglomerate liabilities that shall be done which is pengguliran pass through social solidarity fee that at moves over every month up to 1 year; pengguliran is done to band together KUBE new that help that is given gets merata. In pengguliran this there are many member that don't order in does pengguliran in this help management no profit sharing in agglomerate because of seed money which get on an individual basis been brought off. With this empowerment really helps they to fix family economics.*

***Keywords:** Management in Productive Economic Effort (UEP) and Economic effort help management productive (UEP)*

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatanpun terus-menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan "Misteri" kemiskinan ini. Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus, ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis

multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya harus menjadi prioritas utama dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk katagori kemiskinan kronis (Chronic Poverty) yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan, selain itu terdapat juga warga masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara (Transient Proverty) akibat bencana alam, bencana sosial atau situasi sulit lainnya, jika tidak ditangani serius dapat mengalami masalah kemiskinan kronis

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai

Alamat Korespondensi:

Tukiman, Fisip UPN " Veteran" Jatim Jl. Gunung Anyar Jaya I
Blok B No 15 Surabaya

sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3).

Krisis Perekonomian yang terjadi di negara kita ini telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan, di Jawa Timur sendiri masyarakat kewalahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi, apalagi semakin sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas apalagi untuk masyarakat yang tidak menyangam pendidikan tinggi.

Krisis ekonomi adalah pemicu utama kemiskinan, masyarakat yang awalnya tidak masuk ke golongan masyarakat miskin atau mereka yang masih diatas kategori masyarakat miskin karena adanya krisis ekonomi dan kenaikan harga-harga barang pokok akhirnya mereka masuk ke katagori masyarakat miskin.

Angka kemiskinan seringkali mengalami naik turun karena keadaan krisis ekonomi yang juga tidak stabil. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah masyarakat miskin tahun 2007 berjumlah 37.786.063 jiwa, yang termasuk fakir miskin sebanyak 7.137.699 jiwa atau 18%.

Sementara menurut berita Harian Sinar Harapan yang terbit selasa 25 maret 2008 bahwa di Jawa Timur, dari sekitar 30 juta jiwa penduduknya 7,1 juta jiwa masih berada di bawah garis kemiskinan, kemiskinan juga dipicu oleh jaminan kehidupan yang sangat rendah, mulai pendapatan rendah, pendidikan rendah, jumlah tanggungan banyak, atau karena musibah.

Semburan lumpur panas Lapindo Sidoarjo yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun ini memiliki kontribusi munculnya kemiskinan baru, ribuan warga kehilangan lapangan pekerjaan. Banyaknya masalah-masalah yang menyebabkan timbulnya kemiskinan harus menjadi perhatian yang serius bagi instansi-instansi yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat miskin yang diantaranya adalah Dinas Sosial

Selama ini Pemerintah telah berusaha secara maksimal mengatasi masalah kemiskinan dengan mengadakan berbagai program pemberdayaan yang di antaranya adalah "GERDU TASKIN" (Gerakan

Terpadu Pengentasan Kemiskinan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), PPK (Proyek Pengembangan Kecamatan) namun semua itu masih di anggap belum cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan sehingga pemerintah mengeluarkan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan program unggulan Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin, Program KUBE ini merupakan bantuan yang bersifat stimulan yang bentuk bantuannya tergantung dari permintaan masyarakat itu sendiri dan bantuan di sesuaikan dengan keadaan dalam lingkungannya dan dijalankan secara berkelompok dari keluarga-keluarga yang kurang mampu.

Dalam Berita Utama tabloid Potensi Januari 2008, bahwa Program KUBE yang selama ini dilakukan Dinas Sosial belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin serta mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan. Agar program tersebut pelaksanaannya mampu lebih banyak mengentaskan masyarakat miskin perlu disinergikan dengan beberapa program yang dimiliki oleh instansi lain, seperti disektor koperasi, pertanian, permukiman dan lainnya (diterbitkan Dinas Informasi dan komunikasi Propinsi Jawa Timur Januari 2008).

Ketidakmampuan program ini dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat antara lain dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, kesulitan ekonomi sehingga mereka terpaksa menjual bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial, terdapat ketidaksamaan persepsi, kesatuan langkah dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan strategi (Dinas Sosial, bapak Maulana)

Dasar pertimbangan pemerintah dalam program KUBE ini adalah memberikan panduan bagi Instansi terkait dan masyarakat dalam penanggulangan masalah kemiskinan sehingga terdapat kesamaan persepsi, kesatuan langkah dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, strategi, dan kegiatan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan lembaga keuangan mikro serta berbagai kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.

KUBE disini bersumber dari dana Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia. Program KUBE adalah program Dinas Sosial Propinsi dan Dinas Sosial Kota,

dari program KUBE ini diharapkan masyarakat miskin bisa meningkatkan dan memperbaiki perekonomian keluarganya, serta dengan program KUBE ini pemerintah berharap dapat memberdayakan masyarakat miskin dan mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di negara ini. Sedangkan Kriteria masyarakat miskin yang menjadi ukuran berhak atau tidaknya menerima bantuan disini adalah sebagai berikut:

- Jenis dinding tempat tinggal adalah bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
- Fasilitas pembuangan air besar yaitu tidak punya/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik.
- Sumber air minum adalah sumur/mata air tidak terlindung/air hujan.
- Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- Konsumsi daging/susu/ayam perminggu tidak pernah hanya satu kali dalam seminggu.
- Pembelian pakaian baru untuk Anggota Rumah Tangga (ART) dalam setahun yaitu tidak pernah membeli/hanya membeli satu stel dalam setahun.
- Makan dalam sehari untuk setiap ART hanya satu kali makan sehari
- Tidak mampu membayar untuk berobat ke Puskesmas atau Poliklinik
- Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha/buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau lainnya dengan pendapatan Rp 600.000 perbulan.
- Pendidikan tertinggi kepala keluarga yaitu tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD.

Di Jawa Timur KUBE telah diselenggarakan di beberapa daerah Kabupaten dan Kota salah satunya adalah di Surabaya, di Surabaya KUBE berjalan di beberapa tempat termasuk diantaranya adalah Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan.

KUBE Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan telah berjalan sejak tahun 2004, KUBE telah diprogram di Kelurahan Menanggal oleh Dinas Sosial dikarenakan keadaan lingkungan penduduknya masih banyak yang dikategorikan miskin sehingga di Kelurahan Menanggal sering terjadi kesenjangan sosial antara penduduk miskin dan penduduk yang mampu.

KUBE di Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan berjalan dengan baik namun masih saja ada kendala-kendala atau kemacetan dalam program KUBE disini, KUBE masih dinilai belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Menanggal, namun dengan program KUBE disini sangatlah membantu mereka untuk memulai sedikit lebih maju dan lebih baik sehingga mereka bisa menjalankan kehidupannya walaupun hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok. KUBE di Kelurahan Menanggal berjumlah 5 kelompok yang perkelompoknya terdapat 10 orang dan usaha yang mereka geluti adalah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diantaranya adalah seperti berjualan gorengan, bakso, rujak, kue-kue dan lain sebagainya, yang anggarannya berasal dari Dinas Sosial Propinsi. Anggaran pertama yang mereka terima sebesar Rp4.000.000 per kelompok namun pada kenyataannya pembagian kerja di antara kelompok tidak sama karena usaha yang mereka geluti beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga bantuan yang diterima mereka kelola secara perorangan dan bantuan yang diterima terbagi menjadi Rp 400.000 perorang oleh itu maka tidak ada pembagian keuntungan dalam kelompok dan keuntungan yang mereka dapatkan ada yang digulirkan namun kadang ada yang tidak menggulirkan sama sekali sehingga tersendatnya pengguliran itu maka mereka tidak mendapatkan bantuan stimulan kedua dari Dinas Sosial Propinsi yang jumlahnya sebesar Rp10.000.000 perkelompok.

KUBE dalam bentuk UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang ada di Kelurahan Menanggal penggulirannya seringkali tidak tepat waktu, sering terjadi keterlambatan atau tersendat-sendat dan ada juga yang tidak menggulirkan sama sekali walaupun sebelumnya telah ada perjanjian atau kesepakatan antara kelompok dan pengurus KUBE. (Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KUBE: Ibu Sakiono tanggal 19-07-08) Karena itulah alasan peneliti melakukan penelitian ini.

Menurut Ari Sujito (2007:14) Sosiolog Universitas Gajah Mada untuk mengatasi kemiskinan pemerintah jangan bergantung pada bantuan asing, ia juga mengungkapkan penyaluran bantuan untuk mengatasi kemiskinan bocor ditingkat birokrasi sehingga perlu segera dilakukan evaluasi (Sinar Harapan, Selasa 25 Maret 2008).

Masalah kemiskinan menjadi pembicaraan banyak pihak karena kemiskinan merupakan masalah multi sektoral dan menjadi tanggungjawab semua pihak dari tingkat kementerian atau lembaga maupun individu masyarakat. Perhatian serius kepada keluarga miskin terlihat dari kebijakan-kebijakan atau aktifitas yang dilakukan pemerintah yang sasarannya adalah keluarga miskin.

Kemiskinan kemungkinan bisa sedikit diatasi dengan cara pemerintah melakukan kebijakan yang serius yang memihak pada keluarga miskin dan agar pemerintah melakukan pemberdayaan secara tepat untuk memulihkan masyarakat miskin dan senantiasa melakukan bimbingan sosial, pelatihan dan bimbingan keterampilan sehingga di dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin tidak tertanam dalam pikiran mereka untuk bergantung terhadap bantuan pemerintah sehingga menimbulkan rasa malas untuk bekerja dan sebaliknya agar tertanam rasa ingin hidup sedikit lebih maju dari sebelumnya dan sedikit termotivasi untuk hidup lebih baik dan membenahi perekonomian keluarga dengan keuntungan dari modal pemberian bantuan ini.

Pemberdayaan diharapkan dapat mempercepat tujuan penanggulangan kemiskinan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, karena dalam pemberdayaan pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan dituntut memberikan perlindungan kepada rakyat miskin, juga membela rakyat miskin dalam berbagai aspek yang positif. Rakyat miskin harus senantiasa dilindungi dan didampingi agar memiliki kekuatan untuk meraih sumber daya ekonomi yang lebih baik.

Maraknya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari berbagai segi salah satunya yaitu pemberdayaan sebagai jawaban atas nasib rakyat yang masih banyak terdapat penduduk miskin dan pengangguran. Masyarakat dengan kualitas hidup rendah dan masyarakat terbelakang atau tertinggal di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan demikian pemberdayaan di Indonesia sangat penting untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pemberdayaan sebagian dari pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang merupakan bagian integral dari pembangunan untuk mewujudkan taraf kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan merata

sebagai pencerminan dari tujuan nasional yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 34 menyatakan "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" yang dimaksud dengan fakir miskin disini adalah orang yang sama sekali tidak terpenuhinya kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Fakir miskin juga berarti orang yang mempunyai sumber matapencarian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan dan mereka dipelihara oleh negara. Undang-Undang No 6/1974 Pasal 1 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial"

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin meliputi pemberdayaan bagi masyarakat miskin yang salah satunya melalui bantuan-bantuan sosial dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial. Bantuan sosial adalah bersifat sementara yang diberikan pada keluarga fakir miskin agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah dibawah naungan Departemen Sosial Republik Indonesia memiliki tugas meningkatkan kesejahteraan sosial era globalisasi seperti sekarang ini, sehingga peranan dan fungsi Dinas Sosial sangat penting dalam penanganan masalah sosial seperti pemberdayaan masyarakat miskin.

Dari fenomena-fenomena yang terjadi tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berfikir lebih dalam menangani masalah kemiskinan ini, dan hal ini tidak terlepas dari peranan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur berperan sangat penting dalam menangani masalah pemberdayaan kemiskinan.

METODE

Metode penelitian di maksud untuk menunjukkan suatu konsep secara menyeluruh, disebut penelitian yang di dalamnya terdapat metode atau cara bekerja tertentu, karena pada tahap ini mempermasalahkan bagaimana masalah penelitian yang ada dipecahkan atau ditemukan jawabannya.

Untuk memilih metode yang tepat dalam penelitian maka tergantung dari maksud dan tujuan peneliti,

karena penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, maka penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tailor dalam buku Moleong, 2002:3).

Sedangkan definisi dalam penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada kawasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut, dalam bahasanya dan peristilahannya (Kirk dan Miller dalam buku Moleong, 2002:3).

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan dan ingin mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Kelompok Usaha bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur

HASIL

Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Keberadaan pemberdayaan selalu berhubungan dengan peranan sentral terhadap pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian, seperti halnya yang dikatakan oleh (Suhendra 1988:31) bahwa pemberdayaan masyarakat memerlukan proses perubahan jenis ekonomi dari sektor ke sektor. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif dalam KUBE di Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan yang dimulai sejak tahun 2004 dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dengan tujuan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin dalam merubah dan memperbaiki perekonomian mereka, dengan adanya pemberdayaan yang di programkan pemerintah ini telah membantu mereka menata kembali masalah perekonomian yang ada pada masyarakat miskin.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Program KUBE dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif dilakukan oleh Dinas Sosial Kota dan Dinas Sosial Propinsi dengan tujuan pemberdayaan masyarakat miskin, adapun proses pengelolaan bantuan Usaha Ekonomi Produktif dalam Program KUBE ini tahap pertama adalah Dinas Sosial Kota melakukan

sosialisasi di daerah-daerah atau di tingkat Kelurahan, kemudian mereka membentuk Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) sebagai pengurus lokal di kelurahan termasuk Kelurahan Menanggal Kecamatan gayungan, setelah itu mereka mendata orang miskin yang sesuai dengan kriteria rumah tangga miskin, kemudian mereka mengadakan musyawarah dan membentuk kelompok, setelah itu anggota KUBE mengisi formulir pinjaman dan setelah itu mulai diberikan bantuan untuk dikelola keluarga miskin tersebut. Adapun bantuan yang mereka peroleh dari Dinas Sosial Propinsi Jatim yang berupa bahan dan peralatan seperti kursi plastik, mejikom, etalase dan sebagainya, sedangkan dari Dinas Sosial Kota adalah berupa uang.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Kelompok Usaha Bersama yang dikelola dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif merupakan program yang sangat tepat untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin yang sangat tinggi, program KUBE juga mendidik masyarakat miskin untuk berusaha dan dengan bantuan ini memotivasi mereka untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki dan memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Namun dalam hal pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif ada sesuatu kegagalan yaitu dalam pengelolaan usaha produktif yang selanjutnya atau setelah pengelolaan ini dijalankan terkesan tidak ada pendampingan dari Dinas terkait seperti memberi penyuluhan-penyuluhan pada saat pengelolaan di jalankan, dan memberikan keterampilan sebelum mereka mengelola usaha / memberikan bekal dengan mengajari mereka keterampilan dalam memajukan usaha yang mereka kelola, bukan hanya di serahkan kepada pengurus lokal untuk mengawasi mereka.

Pengelolaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara kolektif dan perorangan

Dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilaksanakan dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terdapat cara-cara dalam pengelolaan bantuannya yaitu secara kolektif dan perorangan.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan bantuan di daerah Kelurahan

Menanggal dilakukan atau diberikan secara kolektif dengan pengelolaan usaha secara perorangan.

Modal usaha dilakukan secara perorangan ini ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan pengelolaan bantuan tersebut harus dikelola secara perorangan, yaitu:

- Faktor tempat tinggal yang berjauhan
- Faktor usaha yang mereka kelola berbeda antara satu dengan yang lainnya

Faktor modal usaha yang kecil

Walaupun modal usaha dalam bantuan dikelola secara perorangan akan tetapi tetap dalam tanggungjawab kelompok, dalam arti ketua kelompok bertanggung jawab terhadap anggotanya seperti mengingatkan mereka dan menagih mereka untuk melakukan pengguliran pada pengurus UPKM, dan apabila ada pertemuan KUBE yang diselenggarakan oleh UPKM (Unit Pembinaan Keluarga Miskin) ketua kelompok bertanggungjawab terhadap kelengkapan anggota kelompoknya untuk ikut dalam hal tersebut, dan itu merupakan kesepakatan dalam kelompok dalam menjalankan Kelompok Usaha Bersama. Dan apabila ada bantuan maka bantuan tersebut di berikan pada kelompok bukan pada individu, dan setelah itu baru dibagi oleh kelompok untuk dikelola secara perorangan. Jadi dalam hal ini antara anggota dalam satu kelompok saling berinteraksi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap pengelolaan baik itu pengelolaan secara kolektif maupun secara perorangan sama-sama mempunyai dampak positif dan dampak negatif, adapun pengelolaan secara kolektif salah satu dampak positifnya adalah antara anggota yang satu dengan yang lain bisa saling bertukar pengalaman dan menyatukan pendapat mereka untuk memajukan usaha yang mereka kelola, namun hal ini juga ada dampak negatifnya salah satunya seperti dalam pembagian keuntungan, dikhawatirkan ada ketidakadilan dalam pembagian hasil keuntungan sehingga akan terjadi ketidak selarasan dalam mengelola usaha dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di antara mereka, begitu juga sebaliknya dalam pengelolaan bantuan secara perorangan.

Idealnya pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam Kelompok Usaha Bersama yang dilakukan oleh Dinas Sosial, yang bantuan diberikan secara kelompok sangat baik dalam hal pemberdayaan

masyarakat miskin, dikarenakan mereka bisa saling berinteraksi, bertukar pendapat juga bertukar pengalaman, yang tentunya pengalaman mereka antara satu dengan yang lainnya berbeda, jadi dengan pemberian bantuan atau pengelolaan secara kolektif mereka bisa menyatukan pengetahuan atau pengalaman yang mereka dapat sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam mengembangkan usaha yang mereka kelola.

PEMBAILASAN

Pengguliran melalui dana Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS)

Bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah merupakan bantuan yang sifatnya bergulir, yaitu dalam pengelolaan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ada kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota KUBE yaitu pengguliran melalui dana Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan peneliti bahwa pengguliran tersebut dilakukan oleh anggota KUBE satu kali dalam setahun dengan cara diangsur perbulan, dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan pengguliran dan jumlah bantuan yang diterima dan pengguliran tersebut digulirkan melalui pengurus UPKM (Unit Pembinaan Keluarga Miskin). Jumlah dari tiap pengguliran yang dilakukan bervariasi disesuaikan dengan jumlah bantuan yang mereka terima dan pengguliran tersebut dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan selama 1 tahun atau 10 bulan, dan apabila mereka tertib dalam melakukan pengguliran maka mereka akan mendapatkan bantuan lagi sebagai bantuan tahap kedua bantuan tersebut bersifat stimulan.

Bantuan dalam kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini harus digulirkan karena masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan, agar bantuan ini bisa merata maka dilakukan pengguliran, pengguliran ini telah menjadi kesepakatan antara keluarga binaan sosial dan Dinas Sosial sebelum keluarga binaan sosial menerima bantuan dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), namun walaupun itu merupakan suatu kewajiban anggota KUBE, sering terjadi kemacetan dan keterlambatan dalam melakukan pengguliran, karena berbagai alasan dan semua itu tidak ada tindakan atau sanksi yang tegas, namun

bagi anggota yang melakukan penggulirannya tidak tertib mereka tidak bisa mendapatkan anggaran bantuan selanjutnya dan pengurus UPKM tetap berkewajiban untuk mengingatkan mereka untuk melakukan pengguliran, dalam melakukan pengguliran tidak ada kesepakatan dalam kelompok namun ketua kelompok mempunyai tanggung jawab untuk menagih dan mengingatkan anggota kelompoknya apabila belum melakukan pengguliran.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengguliran yang dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama ini haruslah diwajibkan dan perlu diperhatikan apabila ada ketidak tertiban, karena pengguliran ini sangat penting dalam menjaga laju atau perkembangan program pemberdayaan masyarakat miskin yang selanjutnya, dengan adanya pengguliran ini para keluarga miskin yang mendapatkan bantuan akan lebih merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka peroleh.

Adapun dengan pengguliran ini membantu pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan, karena bantuan bisa terus bergulir dan berjalan untuk membantu masyarakat memperbaiki perekonomian dalam hidupnya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Swift dan Levin (dalam Suharto, 1997:215) bahwa Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunikasi di arahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pembagian Keuntungan dalam Kelompok Usaha Bersama

Dalam pengelolaan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh Keluarga Binaan Sosial (KBS) atau anggota KUBE di Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan, selain bisa memperbaiki perekonomian keluarga, mereka juga bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti bahwa pembagian keuntungan dalam kelompok itu tidak ada, dikarenakan modal usaha mereka dikelola secara perorangan. Bantuan diberikan secara kolektif namun dalam pengelolaan usahanya adalah secara perorangan. Karena itulah tidak ada

kesepakatan keuntungan dan tidak ada pembagian keuntungan dalam kelompok, keuntungan yang mereka dapat dari hasil bantuan mereka simpan sendiri untuk keperluan sendiri.

Namun dalam hal ini keuntungan yang anggota KUBE peroleh bisa dibilang lebih dari cukup dari pada penghasilan mereka sebelum memperoleh bantuan, dengan bantuan itu usaha mereka lebih berkembang dari sebelumnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam Usaha Ekonomi Produktif baiknya tidak ada pembagian keuntungan yang harus dilakukan dalam kelompok, karena usaha yang mereka kelola secara perorangan. Apabila ada pembagian keuntungan tapi pengelolaan usaha mereka lakukan secara perorangan maka kemungkinan akan timbul masalah dalam kelompok dan bisa ada ketidakadilan dalam pembagian itu. Dalam memperoleh keuntungan seharusnya kelompok bisa menyisipkan keuntungan untuk langsung mengembangkan usahanya bukan cuma untuk digunakan sendiri

Keuntungan itu memang yang di harapkan dalam melakukan pemberdayaan, sehingga dengan adanya keuntungan pemberdayaan bisa di katakan berhasil. Dan dengan keuntungan ini pengguliran bisa berjalan dengan lancar dan keluarga binaan bisa menikmati hasil dari jerih payah mereka sendiri dan tujuan dalam melakukan usaha adalah untuk mereka nikmati dan untuk meraih keuntungan untuk kemakmuran hidup mereka

Hal ini sesuai dengan sektor ekonomi rakyat yaitu sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi melibatkan rakyat banyak dan memberikan manfaat untuk rakyat banyak yaitu masyarakat tidak hanya didorong untuk berpartisipasi dalam melakukan produksi namun juga memiliki dan menikmati hasil-hasilnya, mengawasi, dan mengendalikan berlangsungnya proses produksi. (idris, 1999:12).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Menanggal yaitu bantuan dilakukan secara kolektif namun dengan pengelolaan usaha secara perorangan. Dalam arti bahwa bantuan disini diberikan

secara kolektif tetapi modal usahanya dikelola secara perorangan namun tetap dalam tanggungan kelompok.

Adapun dalam pengelolaan bantuan ada kewajiban yang harus dilakukan anggota KUBE salah satunya yaitu pengguliran melalui Iuran Kesetiakawanan Sosial. Dan pengguliran disini dilakukan dengan cara di angsur dengan tujuan agar tidak memberatkan anggota dalam melakukan pengguliran.

Saran

Bahwa dalam pengelolaan bantuan diharapkan kelompok mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang bisa memajukan usaha kelompoknya dan seharusnya ada pendampingan dari Dinas Sosial Kota Surabaya atau Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur terhadap keluarga binaan sosial pada saat pengelolaan berlangsung seperti memberikan saran-saran dalam memajukan usaha, dan memberikan keterampilan terlebih dahulu agar mereka bisa mengelola usaha mereka dengan sebaik mungkin dan bagaimana mereka mengembangkan usahanya, agar tidak terjadi kegagalan dalam melakukan pengelolaan nanti, dalam hal pengelolaan bantuan disini Dinas terkait diharapkan senantiasa memotivasi dan memberikan rangsangan terhadap keluarga binaan sosial.

Dalam pengguliran diharapkan Pengurus KUBE atau pengurus UPKM memberikan tindakan yang tegas kepada para anggota kelompok yang tidak tertib dan tersendat-sendat dalam melakukan pengguliran, dan diharapkan bagi para anggota KUBE untuk melakukan pengguliran dengan tertib dan sadar diri sehingga masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan bisa segera mendapatkan bantuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Moleong, L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Sunarto, K. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suharto, E. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Britha, M. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Suhendra. 2003. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Alfa Beta.
- Buku Pedoman. *Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. 2007. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.
- Buku Pedoman Kerja. *Kelompok Usaha Bersama*. 2008. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, Surabaya.